

## Application of Pancasila Principles in the Formation of Citizenship Identity

### Penerapan Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Pembentukan Identitas Kewarganegaraan

Ika Arilia Sagita <sup>1</sup>, Ghaniya Fatira Haqqani <sup>2</sup>, Imania Dwi Fevianti <sup>3</sup>, Muhamad Wongso Prasetyo <sup>4</sup>, Audrey Kinanti Noveria <sup>5</sup>, Drs. H. Imam Ghozali, MM. <sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: [23013010136@student.upnjatim.ac.id](mailto:23013010136@student.upnjatim.ac.id) <sup>1</sup>, [23013010137@student.upnjatim.ac.id](mailto:23013010137@student.upnjatim.ac.id) <sup>2</sup>,  
[23013010142@student.upnjatim.ac.id](mailto:23013010142@student.upnjatim.ac.id) <sup>3</sup>, [23013010144@student.upnjatim.ac.id](mailto:23013010144@student.upnjatim.ac.id) <sup>4</sup>,  
[23043010258@student.upnjatim.ac.id](mailto:23043010258@student.upnjatim.ac.id) <sup>5</sup>, [imamgh284@gmail.com](mailto:imamgh284@gmail.com) <sup>6</sup>

#### Abstract

*Civic identity is important in the social and political context in Indonesia, especially in facing the challenges of cultural plurality and ethnic diversity. The introduction and implementation of the principles of Pancasila as the foundation of the state is crucial in shaping civic identity including the element of state defense within it. This article focuses on the exploration and implementation of Pancasila principles in the process of sustainable citizenship identity formation, with the aim of increasing public understanding of Pancasila values and encouraging active participation in strengthening state defense awareness. The research we conducted are quantitative methods with content analysis used to find the data needed and a scoping review to identify and present information from data with various literatures. The principles in this article emphasize the importance of spirituality, humanity, unity, populism, and social justice in the life of the nation. The author hopes that this article can encourage a better understanding of the importance of Pancasila in creating a fairer, prosperous and harmonious society for the country of Indonesia.*

**Keywords:** Pancasila, Civics, State Defense, Principle of Identity, Challenges and Implementation

#### Abstrak

*Identitas kewarganegaraan merupakan hal penting dalam konteks sosial dan politik di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan pluralitas budaya dan keberagaman etnis. Pengenalan dan implementasi prinsip-prinsip Pancasila sebagai fondasi negara menjadi krusial dalam membentuk*

*identitas kewarganegaraan termasuk unsur bela negara didalamnya. Artikel ini memfokuskan pada eksplorasi dan implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam proses pembentukan identitas kewarganegaraan yang berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai Pancasila serta mendorong partisipasi aktif dalam memperkuat kesadaran bela negara. Penelitian yang kami lakukan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis isi yang digunakan untuk mencari data yang dibutuhkan dan review pelingkupan untuk mengidentifikasi dan menyajikan informasi dari data dengan berbagai literatur. Prinsip-prinsip dalam artikel ini menggarisbawahi pentingnya spiritualitas, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa. Penulis berharap artikel ini dapat mendorong pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya Pancasila dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis untuk negara Indonesia.*

**Kata Kunci:** Pancasila, Kewarganegaraan, Prinsip Identitas, Tantangan dan Implementasi

## Pendahuluan

Identitas kewarganegaraan (*civic identity*) merupakan konsep penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini mengacu pada rasa memiliki, kesetiaan, dan keterlibatan warga negara terhadap negaranya. Identitas kewarganegaraan terbentuk melalui proses internalisasi nilai, norma, dan simbol-simbol nasional yang menjadi ciri khas suatu negara. Bagi Indonesia, identitas kewarganegaraan ini memiliki hubungan erat dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

Pancasila, dengan kelima prinsipnya yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan sumber nilai utama dalam membentuk identitas kewarganegaraan Indonesia yang kokoh. Nilai-nilai luhur Pancasila harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta rasa kebanggaan, cinta tanah air, serta partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan nasional.

Sayangnya, identitas kewarganegaraan Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa. Berbagai masalah seperti melemahnya rasa nasionalisme, tumbuhnya sikap individualistis, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap makna Pancasila perlu segera diatasi. Hasil survei menunjukkan pemahaman generasi muda terhadap Pancasila masih rendah, dengan mayoritasnya memperoleh pengetahuan dari media sosial, bukan dari pembelajaran di sekolah. Selain itu, fenomena konflik antar kelompok juga menggambarkan melemahnya rasa persatuan dan kesatuan.

Penerapan prinsip-prinsip Pancasila menjadi kunci penting dalam memperkuat identitas kewarganegaraan Indonesia. Mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa akan membentuk pola pikir serta perilaku warga negara. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, warga negara akan memiliki identitas yang kuat dan berorientasi pada kepentingan nasional, bukan semata-mata kepentingan individu atau kelompok tertentu. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa juga menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh

karena itu, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan identitas kewargaan menjadi hal yang penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam upaya memperkuat keidentitasan warga negara Indonesia. Fokus analisis akan diarahkan pada bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, mempererat persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat keidentitasan warga negara Indonesia berdasarkan Pancasila.

## **Metode**

Penelitian yang kami lakukan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis isi dan review pelingkupan. Analisis isi digunakan untuk mencari data yang dibutuhkan. Menurut Holsti, analisis isi adalah suatu metode penelitian yang menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi ciri-ciri berita secara objektif, sistematis, dan umum (Mahmudah Ningtyas, 2015). Kami menggunakan metode analisis konten untuk mengidentifikasi Penerapan Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Pembentukan Identitas Kewarganegaraan. Scoping review merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan berbagai metode penelitian untuk mengidentifikasi secara menyeluruh dan komprehensif literatur-literatur yang berkaitan dengan suatu topik penelitian, yang diperoleh dari berbagai sumber (Arksey & O'malley, 2005). Tujuan dari tinjauan pelingkupan adalah untuk mengidentifikasi dan menyajikan informasi dari data dari berbagai literatur. Laporan yang diperoleh dari metode scoping review akan digunakan sebagai dasar diskusi komparatif. Kami menggunakan pendekatan scoping review untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Pembentukan Identitas Kewarganegaraan. Metodologi ini dipilih secara cermat untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap ruang lingkup penelitian Penerapan Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Pembentukan Identitas Kewarganegaraan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengaruh Prinsip Sila ke-1 “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pembentukan Identitas Kewarganegaraan**

Pancasila, terutama prinsip pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa atau Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, memainkan peran penting dalam membentuk identitas warga negara Indonesia. Nilai-nilai Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dari negara-negara lain yang lebih sekuler. Pancasila menjadi dasar bagi warga negara Indonesia untuk menunjukkan identitas kewarganegaraannya yang religius.

Pendidikan agama diwajibkan di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Hal ini menunjukkan upaya untuk memperkuat identitas kewarganegaraan yang religius berdasarkan prinsip pertama Pancasila. Prinsip pertama Pancasila menunjukkan bahwa budaya Indonesia tidak hanya berorientasi pada nilai-nilai praktis dan duniawi, tetapi juga bersumber dari nilai-nilai transendental dan sakral. Ini membedakan budaya Indonesia dari budaya sekuler di negara-negara Barat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, agama dihormati tetapi tidak dijadikan dasar. Pemerintahan berdasarkan Pancasila memberikan ruang bagi ilmu pengetahuan dan agama untuk hidup berdampingan dalam kehidupan religius warga negara. Kelima, konsep "Kepercayaan pada Tuhan yang penuh kasih sayang dan toleran" menjadi ciri khas religiusitas bangsa Indonesia, di mana menghormati sesama manusia dianggap sebagai cerminan pemahaman akan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Identitas kewarganegaraan Indonesia tercermin dari aspek spiritual yang dimiliki oleh setiap warga negara, yaitu berupa kepercayaan dan agama yang mereka anut. Secara keseluruhan, prinsip pertama Pancasila Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk dan memperkuat identitas kewarganegaraan Indonesia yang religius, pluralis, dan toleran.

### **Tantangan dan Implementasi Prinsip Sila ke-1 “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Membentuk Identitas Kewarganegaraan**

Ada beberapa tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai spiritualitas yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Ada beberapa warga negara yang menginginkan ideologi agama lain sebagai dasar negara, seperti keinginan untuk membentuk negara khilafah. Terdapat upaya membatasi kelompok agama lain dalam mendirikan tempat ibadah, seperti kasus Ahmadiyah dan penutupan gereja. Adanya pemikiran untuk memisahkan peran negara dari urusan agama, membuat agama menjadi urusan pribadi. Terdapat "agama di identitas" dimana seseorang beragama hanya di kartu identitas namun tidak menjalankan ajaran agamanya. Warga negara yang tidak lagi mengakui Tuhan dan lebih mementingkan materi. Pemahaman mengenai agama yang eksklusif, menganggap kebenaran hanya ada pada kelompoknya. Praktik intoleransi seperti pelarangan ibadah atau perusakan tempat ibadah.

Di sisi lain, ada upaya-upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai spiritualitas yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Menjaga dan memperkuat nilai-nilai spiritualitas Ketuhanan sebagai dasar hubungan antara Tuhan, manusia, dan negara. Menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Membangun pemahaman beragama yang moderat, inklusif, dan toleran. Mencegah radikalisme dan intoleransi atas nama agama. Memperkuat peran negara dalam menjaga kerukunan umat beragama. Mendorong internalisasi nilai-nilai spiritualitas Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Pengaruh Prinsip Sila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dalam Pembentukan Identitas Kewarganegaraan**

Membentuk identitas sipil Indonesia dengan menyoroti penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan masyarakat, instruksi etis dan berbudi luhur, dan kasih sayang. Konsep ini mendorong pemerintah dan masyarakat berkolaborasi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, memberlakukan peraturan yang adil, dan memperkuat perasaan pemahaman dan persatuan di antara individu. Akibatnya, setiap penduduk dididik untuk menghargai banyaknya, kejujuran, dan janji pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan kebenaran, membina komunitas yang lebih adil, makmur, dan berbudaya.

## **Tantangan dan Implementasi Prinsip Sila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dalam Membentuk Identitas Kewarganegaraan**

Kesenjangan sosial dan keuangan, bias berbasis ras dan agama, dan pelanggaran hak asasi manusia merupakan hambatan dari pembentukan identitas sipil Indonesia dengan sila ke 2. Untuk mengatasi kesulitan ini, strategi pemerintah yang diarahkan pada kesetaraan sosial, penegakan hukum yang tidak memihak tanpa bias, bersama dengan pemberdayaan kelompok yang terpinggirkan sangat penting. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pengajaran moral dan etika yang berakar pada prinsip-prinsip Pancasila sangat penting. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengadvokasi etos kemanusiaan, persatuan, dan penerimaan juga merupakan elemen penting. Oleh karena itu, upaya gabungan dari berbagai entitas, termasuk otoritas, lembaga pendidikan, asosiasi masyarakat, dan individu, sangat diperlukan untuk mencapai identitas sipil yang adil, berbudaya, dan kejujuran sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh Sila ke-2 Pancasila.

## **Pengaruh Prinsip Sila ke-3 “Persatuan Indonesia” dalam Pembentukan Identitas Kewarganegaraan**

Pancasila sebagai landasan ideologi negara Indonesia, memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk identitas kewarganegaraan Indonesia. Nilai-nilai persatuan, kebersamaan, dan solidaritas yang terkandung dalam Sila ke-3 Persatuan Indonesia menjadi pondasi utama dalam proses pembentukan kesadaran akan persatuan di antara warga negara. Hal ini memungkinkan terciptanya rasa persatuan yang kuat di antara masyarakat, yang kemudian tercermin dalam perilaku sehari-hari mereka.

Selain itu, Pancasila juga berperan dalam membentuk sikap warga negara Indonesia dalam menghadapi perbedaan etnis dan agama. Melalui edukasi hukum dan kampanye kesadaran tentang persatuan dan tanggung jawab, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kerja sama dan persatuan di tengah perbedaan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol identitas sebagai bangsa, tetapi juga secara aktif membimbing interaksi dan pola pikir kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam membangun negara yang adil dan beradab.

### **Tantangan dan Implementasi Prinsip Sila ke-3 “Persatuan Indonesia” dalam Membentuk Identitas Kewarganegaraan**

Pada era modern, individualisme semakin berkembang pesat, terutama karena kemudahan akses internet yang membuat kita cenderung terlalu terpaku pada dunia maya. Interaksi sosial yang seharusnya menjadi prioritas pun terabaikan, sehingga nilai-nilai sosial seperti kemanusiaan dan gotong royong dapat tergerus, padahal hal tersebut merupakan pondasi utama dari identitas bangsa.

Di sisi lain, kosmopolitanisme juga semakin meningkat, di mana pandangan bahwa semua manusia adalah satu kesatuan semakin diterima secara luas. Meskipun konektivitas global membuka wawasan terhadap berbagai budaya, namun hal ini juga berpotensi mengurangi rasa cinta terhadap tanah air.

Oleh karena itu, tantangan muncul dalam menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi, yang membutuhkan dialog dan pemahaman antar budaya untuk membangun rasa saling menghormati dan memperkuat keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai pemisah. Pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam meningkatkan integrasi nasional yang berkelanjutan.

### **Pengaruh Prinsip Sila ke-4 “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” dalam Pembentukan Identitas Kewarganegaraan**

Sebagai salah satu pilar Pancasila, Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" memainkan peran penting dalam konsep bela negara yang merupakan bagian integral dari identitas kewarganegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi terkandung dalam sila keempat yang mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam konsep bela negara, masyarakat juga diajak untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.

Prinsip “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” juga mencerminkan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Negara mengakui bahwa setiap individu,

kelompok, dan komunitas memiliki kontribusi yang berharga dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Identitas kewarganegaraan Indonesia dibangun atas dasar penghargaan terhadap perbedaan pendapat, keberagaman budaya, dan perbedaan politik. Penguatan partisipasi aktif ini tidak hanya meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi juga memperkuat rasa kebangsaan dan identitas nasional, cinta tanah air maupun bela negara.

Dengan demikian, mengintegrasikan unsur bela negara ke dalam prinsip Sila keempat Pancasila tidak hanya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, tetapi juga mendorong pembentukan identitas kewarganegaraan yang kuat, patriotik, dan siap untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila serta kedaulatan negara demi kesejahteraan bersama.

### **Tantangan dan Implementasi Prinsip “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” dalam Membentuk Identitas Kewarganegaraan**

Salah satu tantangan utama dalam penerapan prinsip, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” adalah rendahnya partisipasi politik dan musyawarah di kalangan masyarakat. Meskipun prinsip-prinsip demokrasi menjadi inti dari sila keempat, banyak warga negara yang masih kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini diperparah oleh kurangnya pendidikan dan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai demokrasi dan musyawarah. Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi dan implementasi sila keempat di berbagai daerah, yang menciptakan ketidakseragaman dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di seluruh wilayah di Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan dalam penerapan sila keempat Pancasila, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis. Salah satu upaya utama adalah penguatan pendidikan Pancasila untuk semua tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan menerapkan program-program/kurikulum yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, musyawarah dan bela negara. Kemudian yang kedua, Pemerintah dapat meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, seperti mengadakan forum-forum musyawarah di

tingkat lokal dan nasional, maupun kampanye kesadaran politik. Pemerintah juga dapat memperkuat peran lembaga-lembaga demokrasi seperti DPR dan MPR untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip musyawarah dan perwakilan diterapkan secara efektif.

### **Pengaruh Prinsip Sila ke-5 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam Pembentukan Identitas Kewarganegaraan**

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini tercermin dalam sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Prinsip keadilan sosial tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan politik yang kemudian membentuk identitas kewarganegaraan yang kuat dan inklusif, dan juga identitas kewarganegaraan yang didasarkan pada keadilan sosial mencerminkan semangat.

Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” juga menekankan pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk kesetaraan dan kesejahteraan. Konsep ini menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, tanpa memandang status sosial, agama, maupun kelas sosial mereka. Sebagai pilar Pancasila, keadilan sosial mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks ini, keadilan sosial tidak hanya mengacu pada pembagian kekayaan, tetapi juga mencakup hak yang sama untuk pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik. Dengan demikian, Pancasila akan mendorong pembentukan identitas masyarakat yang inklusif dan adil.

Pemerintah Indonesia telah memasukkan prinsip-prinsip keadilan sosial ke dalam kebijakan publiknya, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang kurang mampu, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan dasar. Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta membangun identitas kewarganegaraan yang berpusat pada kemakmuran bersama dan solidaritas sosial, pemerintah menerapkan kebijakan publik yang adil. Keadilan sosial dapat

meningkatkan rasa nasionalisme dengan menjamin bahwa setiap warga negara dilindungi dan diterima oleh pemerintah.

Keadilan sosial membentuk identitas kewarganegaraan yang inklusif yang mengutamakan persatuan, kesetaraan, dan solidaritas setiap warga negara. Identitas etnis, budaya, dan agama Indonesia adalah ciri khasnya. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial, masyarakat Indonesia diminta untuk menghargai dan menghormati perbedaan serta bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Identitas kewarganegaraan yang inklusif meningkatkan kohesi sosial dan stabilitas negara. Dalam jangka panjang, ini akan membentuk masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

### **Tantangan dan Implementasi Prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam Membentuk Identitas Kewarganegaraan**

Selama bertahun-tahun, prinsip keadilan sosial telah menjadi bagian penting dari identitas kewarganegaraan Indonesia. Namun, masih ada banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaannya. Beberapa tantangan utama termasuk ketimpangan sosial-ekonomi, korupsi, dan birokrasi yang tidak efisien. Ketimpangan sosial-ekonomi terus menjadi masalah besar yang menghambat pencapaian keadilan sosial. Korupsi juga merusak integritas kebijakan publik dan memperluas kesenjangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengatasi masalah ini. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, prinsip keadilan sosial dapat diterapkan dengan lebih baik dan membentuk identitas kewarganegaraan yang lebih adil dan inklusif.

## **Kesimpulan**

Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk identitas kewarganegaraan yang religius, pluralis, dan toleran. Prinsip pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” menegaskan pentingnya spiritualitas dan keberagaman agama dalam kehidupan berbangsa, memperkuat identitas religius warga negara. Prinsip kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berbudaya. Prinsip ketiga, “Persatuan Indonesia,” menekankan persatuan dan solidaritas di tengah keragaman etnis dan agama, memperkuat rasa kebangsaan. Prinsip keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,” mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi dan pengambilan keputusan yang bijaksana, membentuk kewarganegaraan yang demokratis dan inklusif. Prinsip kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” menegaskan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam distribusi kesejahteraan, membentuk identitas kewarganegaraan yang inklusif dan berbasis solidaritas sosial.

Meskipun tantangan seperti ketimpangan sosial, intoleransi, dan kurangnya partisipasi politik masih ada, upaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila terus dilakukan melalui pendidikan, kebijakan publik, dan peningkatan kesadaran masyarakat, dengan tujuan membentuk masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis.

## **Ucapan Terima Kasih**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya khususnya bagi kami sehingga dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Pembentukan Identitas Kewarganegaraan.” Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Drs. H. Imam Ghozali, MM. selaku dosen pembimbing dari penelitian yang berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Pembentukan Identitas Kewarganegaraan.

## Referensi

- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping Studies: Towards a Methodological Framework. *International Journal of Social Research Methodology: Theory & Practice*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Putri, F. I. S., & Adam, K. M. T. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1(2), 11. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/73627/pdf>
- Yulianto, S. (2021). Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Keadilan Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 123-137.
- Ridha, M. (2016). STUDI TEMATIK KONSEPTUAL TERHADAP AYATAYATAL-QUR'AN TENTANG KEADILAN SOSIAL(RELEVANSI DENGAN SILA KELIMA PANCASILA).
- Azis, R.A., Susetio, W., Nurhayani, N., & Hikmawati, E. (2021). PENYULUHAN HUKUM TERHADAP SIKAP SISWA ANTAR SUKU TERKAIT PENGAMALAN SILA KE-3 PANCASILA DI PESANTREN RUMAH QUR'AN UMAR BIN KHATTAB BOGOR.
- Alfiana, H.N., & Najicha, F.U. (2022). Krisis Identitas Nasional sebagai Tantangan Generasi Muda di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- De Gani, F. A., & Sembiring, M. Y. G. Mengenal Identitas dan Integrasi Nasional Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 1(2), 166-178.
- Silitonga, T. B. (2020). Tantangan Globalisasi, Peran Negara, dan Implikasinya Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 18-19.

Zulkarnain. (2017). Warga Negara Religius sebagai Identitas Kewarganegaraan di Indonesia. (Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, Universitas Ahmad Dahlan).